

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita suatu negara mengalami peningkatan dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan penduduk, tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah mampu menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan namun dilain pihak dihadapkan dengan berbagai masalah seperti pengangguran.

Menurut Astuti (2014:10) bahwa “Pengangguran adalah suatu masalah yang dihadapi semua negara di dunia sebagai akibat dari adanya kesenjangan antara jumlah penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja. Pengangguran selalu menjadi salah satu dari prioritas masalah yang harus dihadapi dalam setiap perencanaan pembangunan”.

Pengangguran merupakan suatu fenomena yang terjadi di semua negara, tak terkecuali di Negara Indonesia. Di Indonesia, pengangguran merupakan suatu permasalahan yang serius, karena menurut Suyuthi (1989:139) bahwa “Dilihat dari segi ekonomi pengangguran dapat merusak perekonomian, selain itu adanya pengangguran menyebabkan kemakmuran masyarakat menjadi berkurang”.

Menurut Sukirno (2010:439) menyimpulkan bahwa “Pembangunan perekonomian memerlukan dua faktor penting yaitu modal dan tenaga ahli. Tersedianya modal saja tidak cukup untuk memoderenkan suatu perekonomian, pelaksana pemodern tersebut juga harus ada. Dengan kata lain, diperlukan berbagai golongan tenaga kerja terdidik”.

Nyatanya yang terjadi saat ini, pengangguran lebih didominasi oleh lulusan SLTA/Kejuruan dan Perguruan Tinggi (tenaga kerja terdidik) yang seharusnya tenaga kerja terdidik menjadi human investment bagi suatu negara. Hal tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam melakukan perluasan kesempatan kerja dan kegagalan dalam menerapkan sistem pendidikan yang lebih baik lagi agar tenaga kerja terdidik dapat bersaing didunia kerja.

Salah satu penyebab pengangguran meningkat adalah bertambahnya jumlah pencari kerja yang pesat namun tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, jumlah pengangguran yang saat ini lebih di dominasi oleh lulusan SLTA/Kejuruan dan Perguruan Tinggi (tenaga kerja terdidik) menunjukkan kemerosotan produktivitas sumber daya manusia yang seharusnya sumber daya manusia harus dimanfaatkan dengan benar, karena sumber daya manusia merupakan pelaku dalam proses pembangunan ekonomi, problematika ini sudah selayaknya memperoleh perhatian yang serius.

Menurut Sutomo (1999) dalam Kusuma (2012:18), menjelaskan kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik disebabkan karena semakin tinggi pendidikan akan meningkatkan aspirasinya

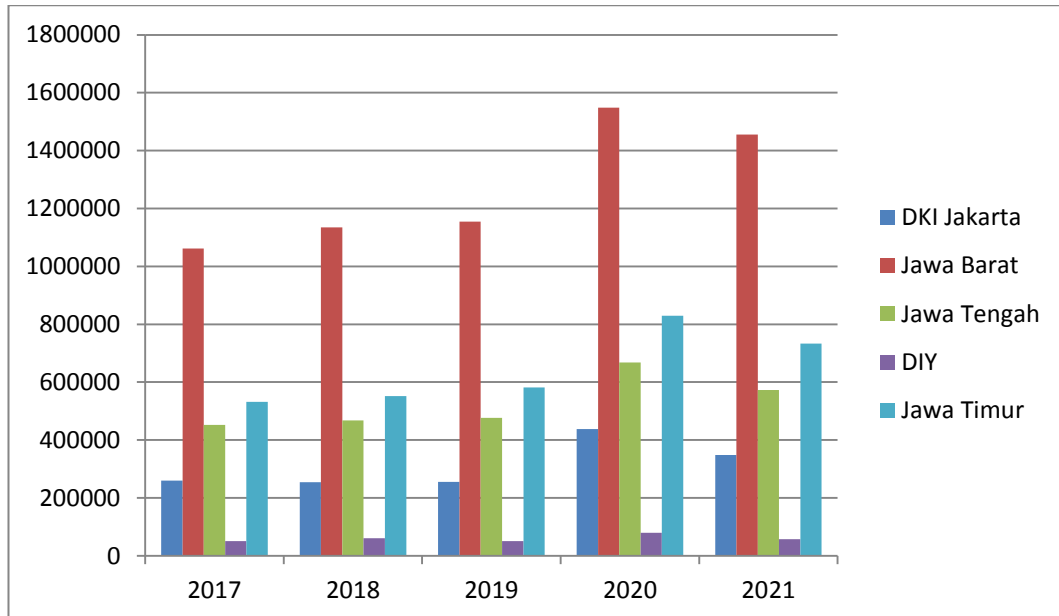
untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai, maka proses untuk mendapatkan pekerjaan di kalangan pencari kerja pendidikan menengah ke atas lebih lama, hal tersebut berkaitan dengan upah yang diterima.

Masih tingginya angka pengangguran terdidik saat ini, para lulusan perguruan tinggi yang diharapkan mampu meminimalisir angka pengangguran ternyata juga tidak mampu menjawab tantangan zaman di era globalisasi. Alhasil, mereka pun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari krisis multidimensi yang terjadi saat ini. pada faktanya, pendidikan hanya dijadikan stratifikasi sosial seseorang. Tanpa bisa memberikan jaminan kualitas dari lulusannya itu sendiri.

Lulusan-lulusan perguruan tinggi yang diharapkan mampu memperbaiki bangsa ini kedepannya. Tetapi malah kejebak pada angka pengangguran terdidik yang selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Semakin terdidik seseorang, harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan juga semakin tinggi. Hal tersebut membuat angkatan kerja terdidik lebih suka memilih menganggur daripada mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Pengangguran tenaga kerja terdidik tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup menarik untuk diamati (Tobing, 1994).

Fenomena unik terjadi untuk pengangguran lulusan sma ke bawah yang terus menurun proporsinya hingga bisa diartikan bahwa lulusan pendidikan dasar dan menengah begitu baik terserap di dunia kerja daripada lulusan diploma (1, 2, 3) dan sarjana. Menjadi masalah bagaimana pengangguran yang ada ini bukan Cuma pengangguran yang memang tidak lanjut bersekolah krena ketiadaan biaya

tapi yang memprihatinkan adalah mereka yang tidak bekerja tetapi latar belakang pendidikan mereka tinggi atau lulusan akademi dan universitas.



Sumber : Simreg Bappenas (data diolah)

Gambar 1. 1 Jumlah Pengangguran Terdidik Di 5 Provinsi Tahun 2017-2021 (Jiwa)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2021 jumlah pengangguran terdidik terbilang masih cukup tinggi dan tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh persebaran jumlah penduduk yang tidak merata dan Pulau Jawa menjadi pusat pendidikan serta pusat pemerintahan dan pusat industri, sehingga para pencari kerja berbondong-bondong datang ke Pulau Jawa. Lalu pada tahun 2020 pengangguran terdidik meningkat signifikan yang disebabkan oleh terjadinya pandemik Covid-19 yang mengakibatkan pemerintah pusat dan daerah harus mengambil tindakan untuk membatasi segala aktivitasnya yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian bahkan menutup usahanya, sehingga berdampak pada para tenaga kerja. Jumlah pengangguran terdidik

tertinggi ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan angka tertinggi pada tahun 2020 dengan jumlah 1.548.852 jiwa, sedangkan pengangguran terdidik terendah ditempati oleh Provinsi D.I Yogyakarta pada tahun 2020 dengan jumlah 79.476 jiwa. Lalu, dari periode 2017 hingga 2021 Provinsi Jawa Barat menempati Jumlah pengangguran terdidik tertinggi.

Berikut tingkat Pengangguran Terdidik menurut Tingkat pendidikan di provinsi Jawa Barat yang dapat dilihat pada tabel 1.1 Sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Di Tamatkan Di Jawa Barat Tahun 2017-2021(dalam %)

Thn	Tingkat Pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan			
	(%)			
	SD kebawah	SLTP	SLTA	Diploma I/II/III/IV/Akademi/Universitas
2017	4,30%	9,68%	13,08%	4,34%
2018	4,48%	8,02%	13,12%	6,51%
2019	4,26%	8,39%	12,61%	6,95%
2020	5,68%	10,70%	16,02%	10,11%
2021	6,07%	9,53%	15,08%	6,98%

Sumber: BPS, Data Diolah

Pada Tabel 1.1 di atas memperlihatkan data tingkat pengangguran SD, SLTP dan SLTA ke atas termasuk tamatan diploma maupun sarjana. Dilihat dari tahun ke tahun tingkat pengangguran SD dan SLTP menunjukkan penurunan secara fluktuatif, tetapi tingkat pengangguran SLTA ke atas cenderung meningkat dari tahun 2017-2020. meskipun tahun 2021 mengalami penurunan. Hal yang menyebabkan lonjakan pengangguran pada 2020 yaitu terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pemerintah pusat dan daerah harus mengambil tindakan

untuk membatasi segala aktivitasnya yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami kerugian bahkan menutup usahanya, sehingga berdampak pada para tenaga kerja. Bisa diartikan penduduk yang lulusan SLTA, diploma maupun sarjana yang tergolong pengangguran terdidik lebih banyak menganggur dibandingkan lulusan SD dan SLTP.

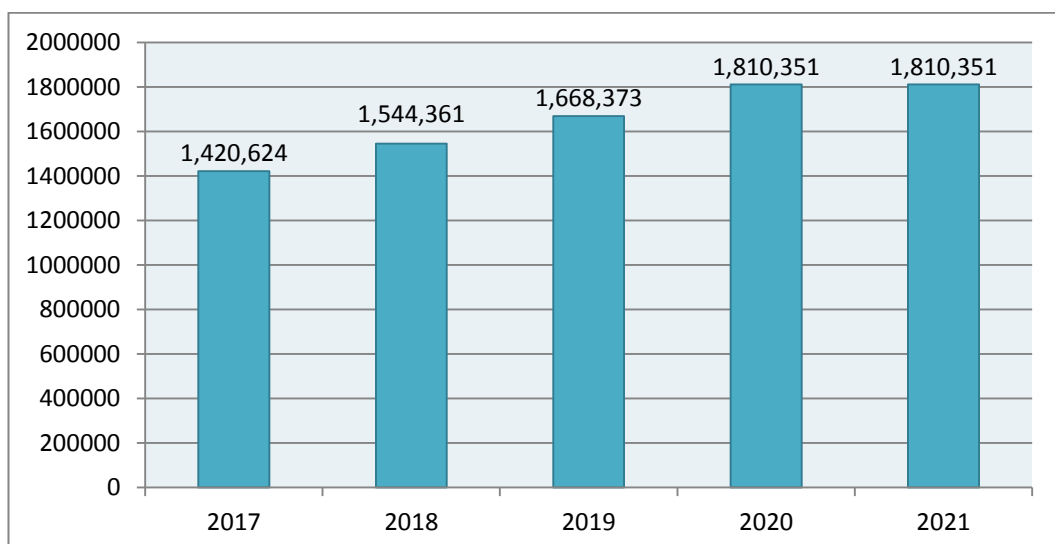
Hal ini menjadi masalah pemerintah daerah sesuai dengan otonomi yang berlaku karena pengangguran terdidik tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam melakukan perluasan kesempatan kerja dan kegagalan dalam menerapkan sistem pendidikan yang lebih baik lagi yang tidak hanya mengandalkan kemampuan akademik saja melainkan kemampuan untuk dapat bersaing di dunia kerja.

Adapun beberapa indikator ekonomi yang dapat mempengaruhi besar kecilnya pengangguran terdidik yaitu upah minimum, investasi dan inflasi. Individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah umumnya mempunyai peluang kerja lebih tinggi jika dibandingkan dengan individu yang memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas. Jika dikaitkan dengan upah, individu yang berpendidikan rendah dapat lebih siap menerima semua jenis pekerjaan sedangkan individu yang memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas akan memiliki tingkat upah minimum yang mereka hendaki.

Mankiw (2006) menjelaskan bahwa kenaikan upah minimum akan mengurangi jumlah tenaga kerja (khususnya yang tidak berpengalaman dan tidak terdidik) yang diminta oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan

pengangguran. Sehingga seharusnya kenaikan upah minimum akan menurunkan pengangguran terdidik karena perusahaan akan memilih seseorang yang terdidik dan memiliki pengalaman untuk menjadi bagian dari perusahaannya sehingga sebanding dengan apa yang dikeluarkannya (upah). Tetapi data tingkat pengangguran terdidik di Jawa Barat selalu mengalami kenaikan padahal UMP di Jawa Barat terus mengalami kenaikan.

Setiap daerah memiliki tingkat upah minimum yang berbeda, semakin tinggi tingkat perekonomian maka upah yang ditawarkan akan semakin tinggi, jika semakin tinggi tingkat upah yang ditawarkan maka tingkat partisipasi tenaga kerja juga akan meningkat dan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan akan lebih tinggi. Jika kondisi tersebut tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja, maka pengangguran akan semakin meningkat. Berikut tingkat upah minimum di provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 :



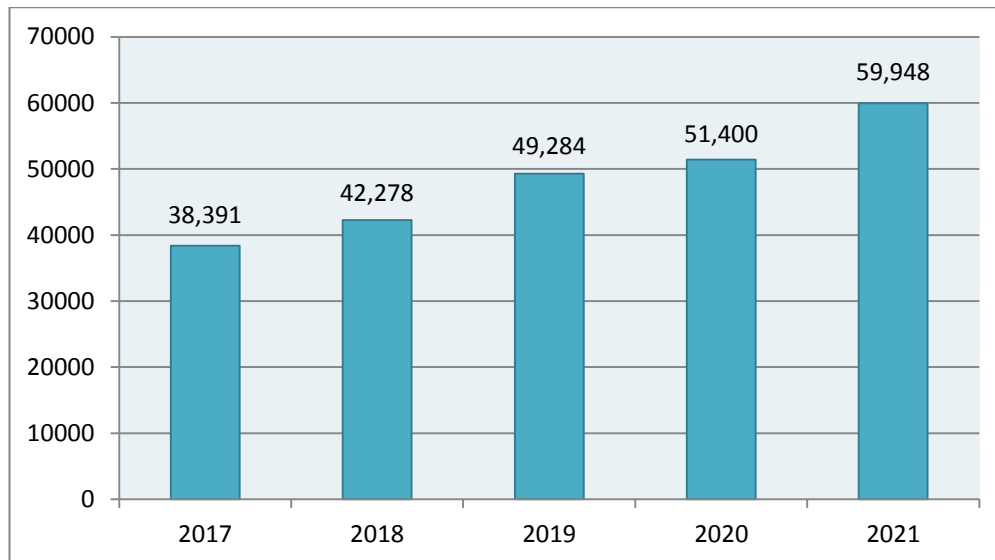
Sumber: BPS

Gambar 1. 2 Upah Minimum di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Rupiah)

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan upah minimum di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021. Pada Tahun 2017-2020 terjadi peningkatan yang signifikan karena Kebijakan Pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah daerah di Jawa Barat, memiliki kebijakan untuk meningkatkan upah minimum setiap tahunnya untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan pada tahun 2021 upah minimum tidak naik karena adanya Covid-19. Namun, tidak naiknya upah minimum bukan berarti pemerintah diam begitu saja, karena sampai sekarang pemerintah masih terus memberikan subsidi kepada para pekerja dalam bentuk subsidi gaji/upah, kartu prakerja, dan berbagai bantuan lainnya

Selain itu salah satu indikator dalam menurunkan tingkat pengangguran juga tidak lepas dari adanya investasi. Menurut Fachry (2015), Peningkatan investasi akan meningkatkan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran akan menurun. Investasi sebagai muara dari terciptanya berbagai lapangan pekerjaan tentunya memiliki peran yang penting dalam menunjang penyerapan tenaga kerja. Investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah republik indonesia (RI) sendiri oleh investor dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing ataupun yang berpatungan

dengan investor dalam negeri. Modal asing dapat dimasukkan ke dalam bentuk modal swasta atau modal negara (Dewi dan Gunawan, 2018: 712).

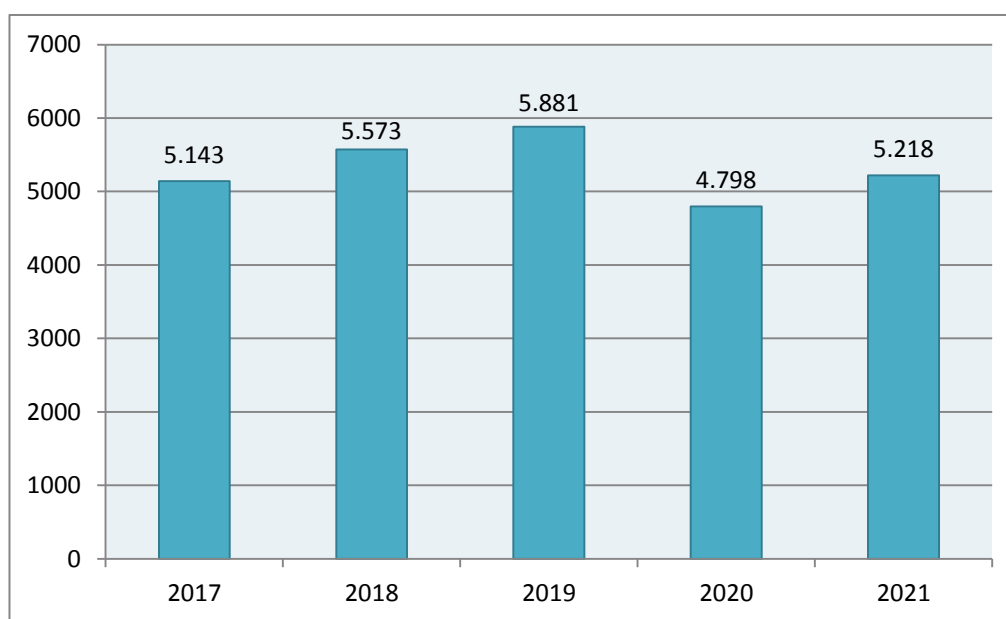


Sumber: BPS

Gambar 1. 3 Penanaman Modal dalam Negeri di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Gambar 1.3 di atas menunjukkan perkembangan penanaman modal dalam negeri di provinsi jawa barat tahun 2017-2021 yang selalu meningkat. Walau pun terjadi krisis moneter yang terjadi pada tahun 2020-2021. PMDN di jawa barat masih meningkat karena tingginya ekspor ditengah tertahannya konsumsi rumah tangga dan investasi. Pada tahun 2017, tercatat jumlah penanaman modal dalam negeri di provinsi jawa barat sebesar 38,391 (miliar rupiah) yang kemudian pada tahun-tahun berikutnya selalu mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2021 mencapai sebesar 59,948 (miliar rupiah). Hal tersebut menandakan bahwasannya penanaman modal dalam negeri di provinsi jawa barat perkembangannya cukup baik.

Iklim penanaman modal dalam negeri yang baik seperti yang di tunjukan oleh data pada gambar 1.3 di atas dapat memicu terhadap penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Seperti yang diungkapkan oleh dewi dan gunawan (2018: 720) bahwasannya ketika penanaman modal dalam negeri meningkat, maka penyerapan tenaga kerja pun akan meningkat. Meningkatnya penanaman modal dalam negeri dapat memperbesar hasil produksi atau akan ada perusahaan-perusahaan baru yang pada akhirnya membutuhkan tenaga kerja atau menciptakan lapangan kerja baru.



Sumber: BPS

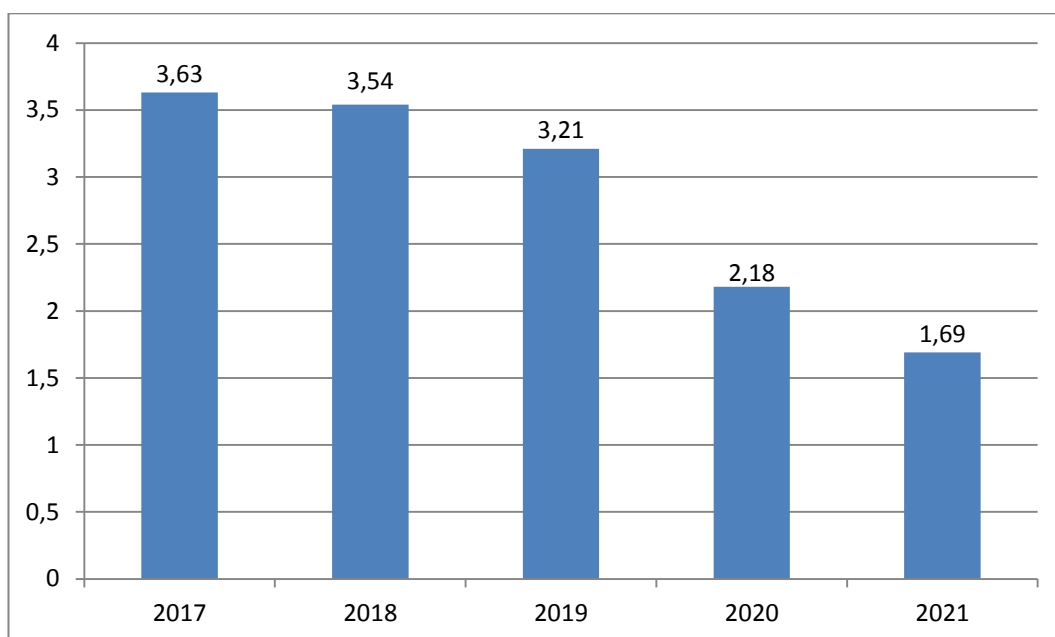
**Gambar 1. 4 Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017-2021 (Juta US\$)**

Gambar 1.4 menunjukkan perkembangan penanaman modal asing di provinsi jawa barat tahun 2017-2021. Pada tahun 2017, tercatat jumlah penanaman modal asing di provinsi jawa barat sebesar 5.143 (juta US\$) yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 4.798 (juta US\$), hal

ini diklaim sebagai akibat dari adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan investor asing mengalami penurunan dalam investasinya di Jawa Barat. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 5.218 (juta US\$). Hal tersebut menandakan bahwasannya penanaman modal asing di provinsi Jawa Barat perkembangannya cukup stabil.

Penanaman modal asing tentunya memiliki peranan yang sama dengan penanaman modal dalam negeri, harapannya adalah dengan jumlah penanaman modal asing yang banyak dapat menyerap tenaga kerja yang banyak pula. Menurut Pasaribu (Tanpa tahun: 239) penanaman modal asing banyak memiliki kelebihan seperti sifatnya yang jangka panjang. Banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, hingga membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini sangat penting bagi negara yang sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan.

Salah satu faktor yang menyebabkan pengangguran adalah menurunnya daya beli masyarakat. Menurut Febiana (2015), Daya beli masyarakat yang menurun jelas menurunkan jumlah barang/jasa yang diproduksi oleh perusahaan, dengan keadaan seperti ini maka perusahaan akan mengurangi permintaan tenaga kerja yang berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja sehingga pengangguran akan semakin meningkat.



Sumber: BPS

Gambar 1. 5 Inflasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021(%)

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa inflasi di provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini terjadi karena inflasi tetap rendah di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat. Didukung oleh pasokan yang terkendali, nilai tukar yang stabil, dan ekspektasi inflasi terjaga dan inflasi ini masuk kedalam golongan inflasi ringan karena kurang dari 10%.

Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik telah menjadikan masalah yang makin serius. Kemungkinan ini disebabkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka semakin tinggi pula aspirasi untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai. Proses untuk mencari kerja yang lebih lama pada kelompok pencari kerja terdidik disebabkan mereka lebih banyak mengetahui perkembangan informasi di pasar kerja, dan mereka lebih berkemampuan untuk memilih pekerjaan yang diminati dan menolak pekerjaan yang tidak sesuai (Mulyono, 1997).

Berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk mengamati masalah pengangguran terdidik dan mengkaji lebih dalam lagi kondisi pengangguran terdidik di jawa barat, judul penelitian yang akan diangkat adalah : **“Pengaruh Upah Minimum, PMDN, PMA dan Iflasi Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Barat Tahun 2009-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan yang melatar belakang penelitian ini, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Inflasi secara parsial terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2021?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) ,dan Inflasi secara bersama-sama terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Inflasi secara parsial terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2021.

2. Mengetahui bagaimana pengaruh Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) ,dan Inflasi secara bersama-sama terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak terkait. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mennambah wawasan pengetahuan bagi penulis, terutama dalam hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu pengaruh Upah Minimum, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Inflasi terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2021.

2. Bagi mahasiswa

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terutama bagi para mahasiswa ekonomi pembangunan untuk dapat terus memperkaya pengetahuannya.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu informasi dan sedikit tambahan bagi pengembangan ilmu penelitian terutama di lingkungan Fakultas Ekonomi yang berkaitan dengan Upah Minimum, Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Inflasi.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh tingkat pengangguran terdidik di Jawa Barat dan dapat menjadi informasi tambahan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah supaya dapat dilakukan secara tepat.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan serta memberikan manfaat dan dapat menjadi perbandingan sehingga kedepannya bisa menjadi penelitian lebih baik lagi.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini berada di Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini penulis melakukan penelitian menggunakan dengan data sekunder, yaitu publikasi dari pihak terpercaya antara lain website Badan Pusat Statistik (BPS), Open Data Jabar, dan jurnal-jurnal lain yang didapat dari internet.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan September yang pada saat itu dimulai dengan pengajuan judul kepada pihak prodi Ekonomi Pembangunan. Berikut jadwal penelitian yang tertuang dalam matriks sebagai berikut:

